

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja yang disusun dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKjIP**) Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (**Renstra**) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (**RKPD**) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat, sehingga kemudian sampai pada pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban yang diukur adalah sasaran, program dan kegiatan yang prosesnya adalah sejauh mana sasaran, program dan kegiatan tersebut dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian Sasaran ataupun Tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja mulai dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan beserta indikatornya, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten



Lamongan Tahun 2021-20216, sebagai pedoman pengambilan kebijakan 5 (lima) tahun yang akan datang.

Tahun 2022 ini merupakan tahun keduapelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026. Secara umum program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari **23 (dua puluh tiga) Sasaran Strategis** dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026 dan secara umum untuk Tahun 2022 dapat berjalan dengan baik dan tercapai seiring Pandemi Covid-19 yang mulai mereda. Apabila terdapat indikator kinerja yang capaian kinerjanya dalam monitoring dan evaluasi belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan secepatnya dilakukan evaluasi dan upaya-upaya perbaikan lebih lanjut.

Dari **Kelima Misi** tersebut diimplementasikan menjadi **5 (lima) Tujuan** dengan **7 (tujuh) Indikator Tujuan** dan **19 (sembilan belas) Sasaran** dengan **27 (dua puluh tujuh) Indikator Sasaran** yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan No. 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Selanjutnya telah ditetapkan Peraturan Bupati Lamongan No. 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022, dengan **325 (tiga ratus dua puluh lima) Program**, **830 (delapan ratus tiga puluh) Kegiatan** dan **2.344 (dua ribu tiga ratus empat puluh empat) Sub Kegiatan** yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sehingga akan diketahui Selisih atau Celah kinerja baik positif atau negatif (**Performance gap**). Selanjutnya atas dasar selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapat strategi

yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (**Performance improvement**).

Terhadap Sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaian kinerjanya digambarkan dengan rata-rata prosentase hasil capaian kinerja dari populasi indikator yang diperoleh.

Dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 7 (tujuh) Indikator Tujuan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan, yaitu antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Gini Rasio
3. Prosentase Penduduk Miskin
4. Indeks Pembangunan Manusia
5. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
6. Indeks Kesalehan Sosial
7. Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan Tahun 2022, disajikan sebagai berikut :

Misi I : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BASELINE 2020	REALISASI 2021	2022		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI	
1.	Pertumbuhan Ekonomi	-2,65%	3,43%	3,55%	5,56%	156,62
2.	Gini Rasio	0,294	-	0,292	0,273	106,96
3.	Prosentase Penduduk Miskin	13,85%	13,86%	13,39%	12,53%	106,86

Terhadap realisasi capaian Indikator Tujuan diatas, pada tahun 2022 semua indikator sebanyak 3 (tiga) indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Terhadap indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Prosentase pertumbuhan ekonomi

Mulai tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mendapat tekanan yang berat mengalami kontraksi sebesar -1,16% karena dampak yang signifikan adanya Pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan mulai Tribulan Ketiga Tahun 2021 tumbuh meski belum tinggi dan sampai dengan akhir tahun 2021 tumbuh sebesar 3,43%. Kondisi tersebut masih lebih baik jika dibandingkan kondisi perekonomian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Hal ini disebabkan masih adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak secara langsung pada ekonomi Global dan berimbas pada perekonomian Regional, Nasional maupun Daerah. Pada tahun 2022 dengan kondisi perekonomian yang sudah kembali normal, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan menjadi 5,56%.

b. PDRB per Kapita

Tahun 2021, capaian angka PDRB per Kapita Kabupaten Lamongan Atas dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha sebesar **Rp. 41.042.888,60**. Sedangkan PDRB per Kapita tahun 2022 dengan capaian sebesar **Rp. 45.441.047,30** meningkat jika dibanding capaian tahun 2021. Hal ini didukung oleh kondisi roda perekonomian lokal, regional dan global yang sudah kembali normal sehingga banyak perusahaan-perusahaan dan pelaku-pelaku usaha yang mulai aktif bergerak dan bangkit kembali.

Misi II : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BASELINE 2020	REALISASI 2021	2022		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,58	73,12	73,29	74,02	100,99

Indikator Kinerja Tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lamongan terus mengalami kenaikan, tahun 2022 nilai capaian IPM adalah **74,02** sedangkan tahun 2021 nilai capaian IPM adalah **73,12**. Hal ini karena didukung strategi dan arah kebijakan yang tepat dalam upaya mewujudkan peningkatan capaian tren positif IPM yang mencakup Indeks Pendidikan, melalui program dan kegiatan antara lain yaitu Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan, Pengembangan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan karier, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan profesi dan kompetensi, Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standart melalui pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru, Pemeliharaan gedung, ruang penunjang pendidikan dan peralatan pendidikan, Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi maupun siswa kurang mampu, Pemberian beasiswa mahasiswa bagi keluarga kurang mampu (GAKIN), Mendorong gerakan budaya membaca/literasi dan numerasi masyarakat, Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa dan lembaga Sekolah, Gerlamsesaku 9 gerakan membaca 1 hari 1 buku. Sedangkan meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Lamongan melalui kegiatan penyediaan armada Mobil Sehat sampai ke seluruh Desa di Kabupaten Lamongan dan kegiatan Home Care Service (HCS) yang dilaksanakan secara lebih optimal.

Nilai capaian IPM di Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 sebesar **74,02** lebih tinggi jika dibanding capaian IPM Jawa Timur tahun 2022 sebesar **72,75** dan capaian IPM Nasional tahun 2022 sebesar **72,91**.

Misi III : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan.

Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BASELINE 2020	REALISASI 2021	2022		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	N/A	80,83	77	77,89	102,87

Terhadap realisasi indikator Tujuan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, pada tahun 2022 capaian kinerjanya sebesar 77,89 melampaui target yang ditetapkan, dibanding capaian kinerja tahun 2021 sebesar 77. Hal ini didukung adanya program dan kegiatan perbaikan serta pembangunan jalan dan jembatan. Tahun 2021 sebesar 97,5% Panjang jalan dalam kondisi mantap dan 81,15% Jumlah jembatan Kabupaten dalam kondisi baik. Selain itu didukung adanya rehab dan pembangunan irigasi, normalisasi waduk, penangan banjir secara terintegrasi dan rehab rumah layak huni, pembangunan Rusunawa serta program dan kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Misi IV : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan, serta Lingkungan yang Aman dan Tenram.

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BASELINE 2020	REALISASI 2021	2022		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Kesalehan Sosial	N/A	-	63,06	86,77	109,36

Kebijakan mengenai Kesalehan Sosial penting guna melihat dinamika ruang publik yang berhubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, pelestarian lingkungan, etika dan budi pekerti, juga kepatuhan terhadap negara dan pemerintah. Kesalehan Sosial menunjukkan perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial. Bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat peduli terhadap masalah-masalah ummat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perpektif orang lain, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain (berempati) dan seterusnya. Kesalehan Sosial adalah suatu bentuk

kesalehan yang tidak cuma ditandai oleh seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya sehingga orang lain merasa nyaman, damai dan tentram berinteraksi dan bekerjasama dan bergaul dengannya. Karena itu Kesalehan Sosial mencakup hubungan baik dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, hubungan baik dengan sesama manusia dan hubungan baik dengan alam/lingkungan sekitar.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Tujuan Indeks Kesalehan Sosial tahun 2022 sebesar **86,77** melebihi target yang ditetapkan sebesar **63,06**.

Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Tujuan : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BASELINE 2020	REALISASI 2021	2022		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	66,30	68,35 (B)	68 (B)	70,02 (BB)	102,97

Indikator Kinerja Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lamongan, berpengaruh penting terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 sebesar 82,62 naik dibanding tahun 2020 sebesar 81,78.

Pada tahun 2021 capaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai sebesar 68,35 (**Predikat B/Baik**), melampaui target yang ditetapkan sebesar 63,00. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 dengan nilai sebesar 70,02 (**Predikat BB/Sangat Baik**), naik predikat dibanding Tahun 2021. Sebagai komitmen bersama dan sebagai upaya peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 telah dibentuk Agen Perubahan pada setiap Perangkat Daerah dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain berupa Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penerapan berbagai aplikasi elektronik dan

menyatukan pelayanan publik dalam Mall Pelayanan Publik (MPP), Peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Diklat dan Manajemen Karier, Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025, Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah setiap Semester, Pendampingan Zona Integritas terhadap 100 Unit Pelayanan Publik (sektor Pendidikan, Kesehatan, Perangkat Daerah dan Kelurahan/Desa).

A.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 (n) dan Perbandingan Kinerja Tahun sebelumnya (n-1)

Pengukuran capaian indikator kinerja setiap Sasaran dikelompokkan berdasarkan **Misi** dan **Tujuan** sebagai berikut :

I. Misi I : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.

Pada **Misi I**, didukung oleh 5 (lima) Sasaran dan 10 (sepuluh) indikator Sasaran, disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI		CAPAIAN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender	73,97	88,99	BPS belum rilis	-
		Nilai Tukar Petani	104,86	106,81	109,26	104,19
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	%PPKS yang meningkat kapasitasnya	4,13%	0,71%	4,50%	108,96
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,97%	4,90%	6,05%	-21,73
		Indeks Daya Beli	0,761	-	0,748	-
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,5%	-1,37	3,94%	788
		%Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2,85%	7,03	6,91%	242,46
		%Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	1,95%	7,20	7,98%	409,23
4.	Meningkatnya efektifitas investasi	%Peningkatan Realisasi Investasi	1,5%	42,00%	27,76%	1.850,67
5.	Meningkatnya Belanja Wisatawan	Jumlah Pengeluaran Wisatawan	175.500.000.000,-	-	462.810.775.483,-	263,71

Sasaran 1, Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat, *dilaksanakan secara kolaboratif* oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dari 2 (dua) indikator Sasaran diatas, realisasi capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2022 sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Sedangkan realisasi capaian Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2022 sebesar 109,26 melebihi target yang ditetapkan sebesar 104,86 atau terealisasi sebesar 104,19%.

Sasaran 2, Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, *dilaksanakan secara kolaboratif* oleh Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Bagian Perekonomian.

Dari 3 (tiga) indikator Sasaran diatas, terdapat 2 (dua) indikator terealisasi pada tahun 2022 realisasinya melampaui target yaitu indikator %PPKS yang meningkat kapasitasnya terealisasi sebesar 4,50% meningkat dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 0,71%, dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,13%. Demikian juga untuk indikator Indeks Daya Beli pada tahun 2022 terealisasi sebesar 0,748 melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,761.

Sedangkan untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2002 terealisasi sebesar 6,05%, meningkat dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 4,90% dan tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar 4,97%.

Sasaran 3, Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan, *dilaksanakan secara kolaboratif* oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Dari 3 (tiga) indikator Sasaran diatas, realisasi capaian pada tahun 2022 semuanya melampaui target yang ditetapkan dan jika dibanding realisasi tahun 2021 semuanya meningkat. Indikator %Pertumbuhan PDRB

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan %Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 3,94%, meningkat dibanding realisasi tahun 2021 sebesar -1,37% dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,5%.

Indikator %Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2022 terealisasi sebesar 6,91%, sedikit menurun dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 7,20% dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,85%.

Demikian pula indikator %Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 7,98%, meningkat dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 7,03% dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,95%.

Sasaran 4, Meningkatnya Efektifitas Investasi, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada tahun 2022 realisasi capaian indikator %Peningkatan Realisasi Investasi sebesar 27,76%, menurun jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 42,00% dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,5%.

Sasaran 5, Meningkatnya Belanja Wisatawan, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Selama tahun 2022 realisasi capaian indikator Jumlah Pengeluaran Wisatawan sebesar Rp 462.810.775.483,- dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,5%.

Dalam mewujudkan **Misi I** tersebut juga didukung dengan Program Perangkat Daerah yang dikolaborasikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang optimal.

II. Misi II : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing.

Pada **Misi II**, didukung dengan 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Sasaran, disajikan dalam tabel berikut :



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI		CAPAI- AN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,64	0,651	0,667	104,22
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,808	0,808	0,813	100,62
3.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	53,60	-	59,17	110,39

Sasaran 1, Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Pada tahun 2022 indikator Indeks Pendidikan terealisasi sebesar **0,667** meningkat jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 0,651 dan melampaui target yang ditetapkan sebesar **0,64**.

Sasaran 2, Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Indikator Indeks Kesehatan pada tahun 2022 terealisasi sebesar **0,813** meningkat jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 0,808 dan melampaui target yang ditetapkan sebesar **0,808**.

Sasaran 3, Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

Indikator Indeks Pembangunan Kepemudaan pada tahun 2022 terealisasi sebesar **59,17** dan melampaui target yang ditetapkan sebesar **53,60**.

III. Misi III : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan.

Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan.

Pada **Misi III**, terdapat 3 (tiga) Sasaran, disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI		CAPAI- AN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur	81,33	-	79,52	97,77
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,69	70,61	64,70	104,88



3.	Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,60		0,70	116,67
----	--	-------------------------	------	--	------	--------

Sasaran 1, Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata, dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas PU Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya serta Dinas Perhubungan.

Pada tahun 2022 indikator Indeks Infrastruktur terealisasi sebesar 79,52 sedikit menurun jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 80,24 dan tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 81,33.

Sasaran 2, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 terealisasi sebesar 64,70 sedikit menurun jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 64,92 dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 61,69.

Sasaran 3, Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Indikator Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar 0,70 dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,60.

IV. Misi IV : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Relegius, Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan serta Lingkungan yang Aman dan Tenram.

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal.

Pada **Misi IV**, terdapat 4 (empat) Sasaran, disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI		CAPAIAN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi	67,60	-	87,42	129,32
2.	Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	Nilai Stabilitas	66,30	-	88,79	133,92
3.	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotongroyong	Nilai Solidaritas	64,06	-	86,77	135,90



4.	Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	54,70	-	55,99	102,36
----	-----------------------------------	-------------------------------	-------	---	-------	--------

Sasaran 1, Meningkatkan Toleransi, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada tahun 2022 indikator Nilai Toleransi terealisasi sebesar 87,42, melampaui target yang ditetapkan sebesar 67,60.

Sasaran 2, Meningkatkan Rasa Aman Masyarakat, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Indikator Nilai Stabilitas pada tahun 2022 terealisasi sebesar 88,79 melampaui target yang ditetapkan sebesar 66,30.

Sasaran 3, Meningkatkan Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotongroyong, dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Indikator Nilai Solidaritas pada tahun 2022 terealisasi sebesar 86,77 melampaui target yang ditetapkan sebesar 64,06.

Sasaran 4, Meningkatkan Masyarakat Berbudaya, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 55,99 melampaui target yang ditetapkan sebesar 54,70.

V. Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Tujuan : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.

Pada **Misi V**, terdapat 4 (empat) Sasaran, disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI		CAPAIAN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	83,22	82,62	83,78	100,67
		Indeks SPBE	3,65	3,32	2,82	
2.	Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	65,00	87,73	63,26	



3.	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Predikat SAKIP	A	A	A	100,00
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100,00
		Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	100,00
4.	Meningkatnya Kemandirian Desa	%Peningkatan Desa Mandiri	75,00%	112,50%	506,25%	450,00

Sasaran 1, Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pada tahun 2022 indikator Nilai IKM terealisasi sebesar 83,78 meningkat jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 82,62 dan melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 83,22. Untuk indikator Indeks SPBE realisasi tahun 2022 sebesar 2,82 menurun jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 3,32 dan tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 3,65.

Sasaran 2, Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

Pada tahun 2022 indikator Indeks Profesionalitas ASN terealisasi sebesar 63,26 menurun jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 87,73 dan tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 65,00.

Sasaran 3, Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pada tahun 2022 indikator Predikat SAKIP, Opini BPK dan Maturitas SPIP semuanya mencapai target yang telah ditetapkan.

Sasaran 4, Meningkatnya Kemandirian Desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada tahun 2022 indikator Prosentase Peningkatan Desa Mandiri terealisasi sebesar 506,25% meningkat jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 112,50% dan melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 75,00%.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

I. Misi I dengan 1 (satu) Tujuan dan 5 (lima) Sasaran serta 10 (sepuluh) indikator kinerja Sasaran.

Misi I : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.

Pada **Misi I**, terdapat 5 (lima) Sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI		CAPAIAN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender	73,97	88,99	BPS belum rilis	-
		Nilai Tukar Petani	104,86	106,81	109,26	104,19
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	%PPKS yang meningkat kapasitasnya	4,13%	-	4,50%	108,96
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,97%	4,90%	6,05%	
		Indeks Daya Beli	0,761	-	0,748	
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,5%	-1,37	3,94%	788
		%Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2,85%	7,20	6,91%	242,46
		%Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	1,95%	7,03	7,98%	409,23
4.	Meningkatnya efektifitas investasi	%Peningkatan Realisasi Investasi	1,5%	42,00%	27,76%	1.850,67
5.	Meningkatnya Belanja Wisatawan	Jumlah Pengeluaran Wisatawan	175.500.000.000,-	-	462.810.775.483,-	263,71

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 9 (sembilan) indikator Sasaran telah memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan. Demikian pula jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2021. Namun terdapat 1 (satu) indikator Sasaran yang tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tahun 2021 terealisasi sebesar 4,90% dan tahun 2022 sebesar 6,05% meningkat sebesar 1,15% dan dari target yang ditetapkan lebih tinggi 1,08 poin atau dengan kata lain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat.

II. Misi II dengan 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran serta 3 (tiga) indikator kinerja Sasaran.

Misi II : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing.

Pada **Misi II**, terdapat 3 (tiga) Sasaran dengan 3 (tiga) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI		CAPAIAN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,64	0,651	0,667	104,22
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,808	0,808	0,813	100,62
3.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	53,60	-	59,17	110,39

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) indikator Sasaran tahun 2022 telah memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dan lebih tinggi jika dibanding dengan realisasi capaian kinerja tahun 2021.

III. Misi III dengan 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran serta 3 (tiga) Indikator kinerja Sasaran.

Misi III : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan.

Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan.

Pada **Misi III**, terdapat 3 (tiga) Sasaran dengan 3 (tiga) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI		CAPAIAN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur	81,33	-	79,52	97,77



2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,69	64,92	64,70	104,88
3.	Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,60	-	0,70	116,67

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) indikator Sasaran tahun 2022 yang telah memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Demikian juga jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2021 lebih tinggi.

IV. Misi IV dengan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran serta 4 (empat) Indikator kinerja Sasaran.

Misi IV : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Relegius, Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan serta Lingkungan yang Aman dan Tentram.

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal.

Pada **Misi IV**, terdapat 4 (empat) Sasaran dengan 4 (empat) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI		CAPAIAN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi	67,60	-	87,42	129,32
2.	Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	Nilai Stabilitas	66,30	-	88,79	133,92
3.	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotongroyong	Nilai Solidaritas	64,06	-	87,06	135,90
4.	Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	54,70	-	55,99	102,36

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) indikator Sasaran tahun 2022 yang telah memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2021 tidak bisa karena 4 (empat) indikator Sasaran tersebut merupakan indikator kinerja baru yang mana di tahun 2021 belum ada dan mulai tahun 2022 menggunakan pedoman dokumen baru yaitu RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

V. Misi V dengan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran serta 7 (tujuh) Indikator kinerja Sasaran.

Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Tujuan : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.

Pada **Misi V**, terdapat 4 (empat) Sasaran dengan 7 (tujuh) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI		CAPAIAN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	83,22	82,62	83,78	100,67
		Indeks SPBE	3,65	3,32	2,82	77,26
2.	Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	65,00	87,73	63,26	97,32
3.	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Predikat SAKIP	A	A	A	100,00
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100,00
		Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	100,00
4.	Meningkatnya Kemandirian Desa	%Peningkatan Desa Mandiri	75,00%	112,50%	506,25%	450,00

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 5 (lima) indikator Sasaran tahun 2022 yang telah memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat 2 (dua) indikator Sasaran yang belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu indikator Indeks SPBE dan Indeks Profesionalitas ASN.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah

I. Misi I dengan 1 (satu) Tujuan dan 5 (lima) Sasaran serta 10 (sepuluh) indikator kinerja Sasaran.

Misi I : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.



Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.

Pada **Misi I**, terdapat 5 (lima) Sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMD Th. 2026	REALISASI		CAPAIAN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender	74,05	88,99	BPS belum rilis	-
		Nilai Tukar Petani	104,90	106,81	109,26	104,19
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	%PPKS yang meningkat kapasitasnya	4,88%	-	4,50%	108,96
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,07%	4,90%	6,05%	
		Indeks Daya Beli	0,794	-	0,748	
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,5%	-1,37	3,94%	788
		%Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	6,92%	7,20	6,91%	242,46
		%Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	7,39%	7,03	7,98%	409,23
4.	Meningkatnya efektifitas investasi	%Peningkatan Realisasi Investasi	3,5%	42,00%	27,76%	1.850,67
5.	Meningkatnya Belanja Wisatawan	Jumlah Pengeluaran Wisatawan	268.500.000.000,-	-	462.810.775.483,-	263,71

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 5 (lima) indikator Sasaran telah melampaui target kinerja Jangka Menengah yang ditetapkan. Namun terdapat 1 (satu) indikator Sasaran yang menurun dari target kinerja Jangka Menengah yang ditetapkan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tentu hal tersebut merupakan tantangan tersendiri yang harus dilakukan penanganan melalui langkah-langkah strategis.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada Misi I antara lain adalah :

Sasaran 1 :

- a. Program Pengarusutamaan Gender, Program Pengolahan Sistem Data Gender dan Anak dan Program Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan



Pangan, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sasaran 2 :

- a. Program Pemberdayaan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja, yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- c. Program Pengolahan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan..

Sasaran 3 :

- a. Program Pengolahan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pemberdayaan Usaha Menengah dan UMKM, Program Pengembangan UMKM, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Sasaran 4 :

Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal , yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sasaran 5 :

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Wisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

II. Misi II dengan 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran serta 3 (tiga) indikator kinerja Sasaran.

Misi II : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing.

Pada **Misi II**, terdapat 3 (tiga) Sasaran dengan 3 (tiga) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMD Th. 2026	REALISASI		CAPAIAN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,644	0,651	0,667	104,22
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,811	0,808	0,813	100,62
3.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	55,60	-	59,17	110,39

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) indikator atau semua indikator Sasaran pada Misi II telah tercapai bahkan melampaui target Jangka Menengah yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada Misi II antara lain adalah :



Sasaran 1 :

Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Sasaran 2 :

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soegiri dan RSUD Ngimbang.

Sasaran 3 :

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

III. Misi III dengan 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran serta 3 (tiga) Indikator kinerja Sasaran.

Misi III : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan.

Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan.

Pada **Misi III**, terdapat 3 (tiga) Sasaran dengan 3 (tiga) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMD Th. 2026	REALISASI		CAPAIAN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur	83,33	-	79,52	97,77
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,74	64,92	64,70	104,88
3.	Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,68	-	0,70	116,67

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 2 (dua) indikator Sasaran telah melampaui target Jangka Menengah yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada Misi II antara lain adalah :

Sasaran 1 :

Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Sasaran 2 :

Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran, dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Sasaran 3 :

Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

IV. Misi IV dengan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran serta 4 (empat) Indikator kinerja Sasaran.

Misi IV : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Relegius, Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan serta Lingkungan yang Aman dan Tentram.

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal.

Pada **Misi IV**, terdapat 4 (empat) Sasaran dengan 4 (empat) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMD Th. 2026	REALISASI		CAPAI- AN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi	79,08	-	87,42	129,32
2.	Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	Nilai Stabilitas	71,77	-	88,79	133,92
3.	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotong-royong	Nilai Solidaritas	70,71	-	87,06	135,90
4.	Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,50	-	55,99	102,36

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 4 (empat) indikator atau semua indikator Sasaran pada Misi IV telah tercapai bahkan melampaui target Jangka Menengah yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada Misi II antara lain adalah :

Sasaran 1 :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Penanganan Bencana, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

V. Misi V dengan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran serta 7 (tujuh) Indikator kinerja Sasaran.

Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Tujuan : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.

Pada **Misi V**, terdapat 4 (empat) Sasaran dengan 7 (tujuh) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMD Th. 2026	REALISASI		CAPAIAN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	85,73	82,62	83,78	100,67
		Indeks SPBE	4,00	3,32	2,82	77,26
2.	Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	74,00	87,73	63,26	97,32
3.	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Predikat SAKIP	A	A	A	100,00
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100,00
		Maturitas SPIP	Level 4	Level 3	Level 3	100,00
4.	Meningkatnya Kemandirian Desa	%Peningkatan Desa Mandiri	375,00%	112,50%	506,25%	450,00

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) indikator Sasaran telah tercapai bahkan melampaui target Jangka Menengah yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada Misi II antara lain adalah :

Sasaran 1 :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- b. Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sasaran 2 :

Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sasaran 3 :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

Sasaran 4 :

Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Standar Nasional identik dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Setiap Kementerian memiliki dasar peraturan perundang-undangan yang berbeda, sampai dengan tahun 2020 ini sebagian besar kementerian belum mengeluarkan target untuk indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perbandingan realisasi beberapa indikator kinerja Tahun 2021 dengan beberapa bidang SPM yang dilaporkan oleh Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.

Tabel 1.1
Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (PAUD)	100%	2021
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	2021
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2021

Sumber : Permendagri Nomor 100 Tahun 2018

Tabel 1.1 Capaian Realisasi SPM Dinas Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Keterangan
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (PAUD)	100%	100 %	- Formulasi perhitungan: $\text{Realisasi} = \frac{\text{Anak usia 5-6 th pada TK/RA}}{\text{Anak usia 5-6 th seluruhnya}}$ - Realisasi jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada TK/RA sebanyak 27544 anak sedangkan jumlah anak usia 5-6 tahun di Kab. Lamongan sebanyak 27544 anak. - Realisasi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 100 % karena di Kabupaten Lamongan semua desa/ kelurahan telah memiliki lebih dari 1 (satu) lembaga TK/RA bahkan semua dusun telah memiliki lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	- Formulasi perhitungan: $\text{Realisasi} = \frac{\text{Anak usia 7-15 th pada SD/MI, SMP/MTs}}{\text{Anak usia 7-15 tahun}}$ - Realisasi jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Lamongan sebanyak 86110 anak, sedangkan jumlah seluruh anak usia 7-15 tahun sebanyak 86110 anak, dengan rincian anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan di SD/MI sebanyak 51471 anak dari total 51471 anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Lamongan,



					sedangkan anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan SMP/MTs sebanyak 34639 dari total penduduk usia 13-15 tahun sebesar 34639 anak atau 100 % hal ini dapat dicapai karena adanya kebijakan sekolah inklusi atau sekolah reguler yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus.
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	<p>- Formulasi perhitungan: Realisasi = $\frac{\text{Anak usia 7-18 th pd PaketA/B/C}}{\text{Anak usia 7- 18 tahun}}$</p> <p>- Realisasi jumlah anak usia 7-18 tahun yg terlayani pendidikan kesetaraan sebanyak 2.758 anak, sedangkan jumlah anak usia 7-18 tahun yg belum terlayani pendidikan formal baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sebanyak 2.758 anak.</p> <p>- Penduduk usia 7-18 tahun yg belum berpartisipasi pada pendidikan formal baik SD/ MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA untuk berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan baik Paket A, B maupun C karena masyarakat telah memahami pentingnya pendidikan untuk peningkatan kesejahteraan hidup.</p>
		Jumlah	100%	100%	<p>Pencapaian realisasi Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sebesar 100 % disebabkan :</p> <p>- Semua desa/ kelurahan telah memiliki lebih dari 1 lembaga pendidikan baik PAUD (TK/RA), Sekolah Dasar (SD/MI) sedangkan untuk lembaga SMP/MTs masing-masing Kecamatan telah memiliki lebih dari satu lembaga pendidikan. Hal ini karena partisipasi masyarakat melalui yayasan pengelola pendidikan yg sangat tinggi untuk menyediakan layanan pendidikan baik pendidikan formal, nonformal maupun pendidikan luar biasa, sehingga masyarakat yg berkebutuhan khusus juga dapat mengakses pendidikan sesuai minat, bakat dan kebutuhannya.</p> <p>- Untuk penduduk usia 7-18 tahun yg belum terlayani pendidikan formal baik di SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yg terlayani pada Pendidikan Kesetaraan baik Paket A, B maupun C karena masyarakat telah memahami akan pentingnya pendidikan baik pendidikan umum maupun agama untuk peningkatan kualitas hidupnya.</p>

Sumber : Data Dinas Pendidikan Tahun 2022 (diolah)



Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2022, yaitu pada kurun waktu bulan Januari s/d Desember telah mencapai 100%. Artinya, seluruh penduduk usia sekolah di Kabupaten Lamongan telah mendapatkan pelayanan pendidikan pada Tahun 2021 sesuai dengan jenjang usia masing-masing. Realisasi SPM menurut jenis pelayanan dasar meliputi Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 29.516 orang, Pendidikan Dasar sebanyak 167.222 orang, Pendidikan Kesetaraan sebanyak 2.758 orang.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1). Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan belum sesuai standar;
- 2). Kualitas dan kuantitas guru belum memenuhi standar;
- 3). Belum meratanya kualitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- 4). Sebagian anak usia sekolah dari keluarga miskin belum mendapat kan bantuan beasiswa dari Program Indonesia Pintar (PIP) karena belum masuk data base DTKS di Pusat;
- 5). Lembaga pendidikan inklusi belum bisa melayani anak berkebutuhan khusus secara optimal karena keterbatasan pendidik untuk anak berkebutuhan khusus.

Terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1). Pemenuhan terhadap kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan termasuk untuk pembelajaran yang berbasis komputer secara bertahap ;
- 2). Pemenuhan kebutuhan guru melalui penambahan CPNS maupun guru P3K serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan bimbingan teknis baik secara daring maupun luring.

- 3). Pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru secara bertahap;
- 4). Pemberian beasiswa untuk anak-anak dari keluarga miskin;
- 5). Kerja sama dengan lembaga pendidikan luar biasa terdekat.

2. Bidang Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota, mencakup pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD di Kabupaten Lamongan.

Tabel 2.1 Capaian Indikator SPM Pelayanan Kesehatan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET DAERAH (%)	TARGET NASIONAL (%)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yg mendapatkan layanan kesehatan	100	100
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
12.	Pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100

Tabel 2.2 Realisasi Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Target / Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	16.132	15.327	95,01
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	15.398	15.338	99,61
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	14.665	14.569	99,35
4.	Pelayanan kesehatan balita	60.245	60.245	100
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	122.724	119.443	97,33
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	770.147	770.147	100
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	199.192	191.478	96,13
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	336.361	336.361	100
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	23.264	23.264	100
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	2.533	2.533	100
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	13.608	19.823	145,67
12.	Pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV	18.205	20.953	115,09

Sumber : Data Dinas Kesehatan Tahun 2022 (diolah)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Kesehatan, meliputi Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis, dan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Secara umum, pelayanan bidang kesehatan sudah berjalan baik, yaitu sebagian besar target tercapai 95% lebih.

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	95,01	1. Dalam pelaksanaan pelayanan ibu hamil, seluruh ibu hamil sudah dilakukan pemeriksaan K4



			2. Sebagian ibu hamil ada yang belum masuk masa K4 3. Sebagian ibu hamil bersalin prematur
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	99,61	1. Semua ibu bersalin sudah ditolong oleh nakes dan bersalin di fasilitas kesehatan, namun ada sebagian ibu hamil yang pada saat usia kehamilan tua kembali ke daerah asalnya
3.	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	99,35	1. Pada dasarnya semua bayi baru lahir sudah dilakukan pemeriksaan sesuai standar, ada sebagian bayi baru lahir yang belum masuk waktu kunjungan ke-3
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100	
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	97,33	1. Sebagian kecil siswa saat dilakukan skrining tidak masuk karena sakit
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	96,13	1. Ada sebagian lansia yang tidak berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis (TB)	144,43	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	115,09	

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Tersedianya akses air bersih yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Bersih dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Tersedianya akses pengolahan air limbah domestik. Terdapat 2 jenis pelayanan yaitu:



- 1) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S)
- 2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)

Indikator tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Namun beberapa hal pokok yang terdapat dalam indikator RPJMD pada dasarnya merupakan muatan / komponen dari indikator nasional yang dapat dipilah dan diadopsi untuk digunakan dalam menghitung capaian kinerja berdasarkan indikator nasional, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Daerah Kab/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Rumus	Nilai	
1	2	3	4	5	6
Bidang Urusan Pekerjaan Umum					
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Σ masyarakat / rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan + bukan jaringan perpipaan <u>terlindungi</u>	100%	2021
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Σ total proyeksi rumah tangga di seluruh Kab. Lamongan Σ rumah yg memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Σ rumah yg lumpur tinjanya telah diolah di PLT + Σ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah <u>IPALD</u> Σ rumah di Kab. Lamongan	100%	2021

Tabel 3.2 Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	
		Target	Realisasi
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	
		<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>
1.	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	672.221 Warga	683.631 Warga
2.	Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	707.407 Warga	695.997 Warga
	(jumlah total yang harus terlayani)	1.379.628 Warga	1.379.628 Warga

2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	
		Target	Realisasi
	1. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yg bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	0 Warga	0 Warga
	2. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yg bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ ha dan seluruh wilayah perkotaan	1.365.854 Warga	1.365.854 Warga
	3. Pelayanan Penyediaan prasarana dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	1.205 Warga	1.205 Warga
	(jumlah total yang harus terlayani)	1.379.628 Warga	1.379.628 Warga

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal 2022			
		Indikator	Rumus	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Pekerjaan Umum					
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yg memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Σ masyarakat/rumah tangga yg mendapat akses thd air minum melalui SPAM jaringan perpipaan + bukan jaringan perpipaan <u>terlindungi</u>	100%	$\frac{683.631+695.997}{1.379.628} = 100\%$
			Σ total proyeksi rumah tangga di seluruh Kab. Lamongan		683.631 Warga 695.997 Warga
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Σ warga yg memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Σ warga yg lumpur tinjanya telah diolah di PLT + Σ warga yg memiliki sambungan rumah & air limbahnya diolah IPALD Σ rumah di Kab Lamongan	94,53%	$\frac{1.365.854+1.205+12.569}{1.379.628} = \frac{1.379.628}{1.379.628} = 100\%$
			Σ warga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk		1.365.854 warga



		Σ warga yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT		1.205 warga
		Σ warga yg memiliki sambungan rumah & air limbahnya diolah di IPALD		12.569 warga

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022 (diolah)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, meliputi Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik telah berjalan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - a) Tingkat pelayanan air minum yang masih rendah,
 - b) Kurangnya kualitas air baku sesuai standart kualitas air minum;
 - c) Kurangnya kuantitas / ketersediaan air baku,
 - d) Terkendala oleh cuaca yang tidak menentu terutama pada saat curah hujan tinggi lokasi yang berada di wilayah yang rawan banjir menjadi terganggu karena beberapa lokasi perkerjaan terendam banjir;
 - e) Membutuhkan teknologi untuk proses pengolahan air layak minum.
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik
 - a) Terkendalanya sarana dan prasarana dalam pengolahan limbah
 - b) Kurangnya keahlian SDM mengenai pengolahan limbah
 - c) Belum terlaksananya pemeliharaan IPAL komunal yang sudah terbangun
 - d) Pengelolaan air limbah domestik belum optimal.

Terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari



- a) Meningkatkan pelayanan air minum di seluruh wilayah Lamongan dengan mengoptimalkan kerja sama dengan pihak ketiga;
 - b) Digunakan teknik pendugaan air bawah tanah (geo listrik) dengan biaya diambilkan dari pagu masing-masing desa. Namun hal ini tidak dapat berhasil 100 % dikarenakan ada beberapa lokasi desa yang memiliki air bawah tanah asin/ payau, keadaan asin/ payau tersebut tidak mampu dideteksi oleh alat geo listrik;
 - c) Berkoordinasi dengan OPD terkait mengenai keberadaan air permukaan berupa waduk/embung sebagai sumber air baku;
 - d) Meningkatkan pengetahuan / teknologi untuk pengolahan air minum agar sesuai standar.
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik
 - a) Peningkatan prasarana dan sarana pada Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT)
 - b) Peningkatan SDM dengan pembekalan teknis pengolahan limbah
 - c) Sosialisasi ke masyarakat mengenai pengolahan air limbah domestik
 - d) Memelihara dan mengoptimalkan operasional Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) komunal yang sudah ada.

4. Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat

Jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana Kab/Kota

Pengertian Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor. Alur dari penanganan rumah korban bencana

1. Penetapan bencana

Pada saat terjadi bencana, perlu ada penetapan SK bencana oleh Bupati

2. Penentuan penerima layanan

Dilaksanakan pendataan seluruh korban dan identifikasi kerusakan rumah yang dilaksanakan secara bersama oleh Tim satgas dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan masyarakat. Selanjutnya berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Lamongan dan data



penerima akan diverifikasi oleh Tim Satgas BPBD.

3. Penyusunan rencana aksi

Dalam penyusunan rencana aksi Tim Satgas dinas berkoordinasi dengan masyarakat dalam pemenuhan SPM ini.

Dalam hal ini akan diidentifikasi :

- a) Status kepemilikan rumah yaitu status bukan milik dan status milik.
- b) Tingkat kerusakan yaitu rusak ringan, rusak sedang atau rusak berat.

Rencana aksi yang telah disusun ini harus disepakati oleh Tim Satgas BPBD dan warga.

4. Penyediaan dan rehabilitasi

Berdasarkan Dokumen Rencana Aksi maka akan dilaksanakan beberapa alternatif penanganan yaitu :

- a) Jika status kepemilikan bukan milik maka akan mendapat bantuan akses sewa rumah layak huni
- b) Jika memiliki bukti status kepemilikan maka akan dilakukan rehabilitasi rumah, pembangunan kembali atau relokasi berdasarkan pada tingkat kerusakannya.

Perhitungan sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat dan perhitungan SPM dilakukan per tahun sesuai dengan penyelesaian per tahun pada rencana aksi dengan maksimal target penyelesaian selama 3 (tiga) tahun untuk satu kejadian bencana.

b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya jumlah rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah. Dengan maksud untuk pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha dan atau penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan “bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer. Alur dari penanganan rumah korban bencana adalah :



1. Pra relokasi

Pada tahapan ini, yang dikerjakan adalah :

- a) Pendataan terhadap :
 - 1) perumahan yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.
 - 2) rumah sewa existing.
 - 3) Perumahan di lahan bukan fungsi permukiman.
- b) Sinergitas program antara OPD bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan OPD bidang lainnya.
- c) Sinkronisasi ke dalam RKPD.
- d) Sosialisasi tentang relokasi program pemerintah daerah dan layanan SPM fasilitasi penyediaan rumah layak huni.

2. Relokasi

- a) Verifikasi penerima pelayanan akan ditentukan :
 - 1) Fasilitasi penggantian hak atas tanah dan atau bangunan.
Maka akan dilaksanakan Pendampingan teknis penerima pelayanan berupa mekanisme pengadaan lahan dan Lahan alternatif rumah layak huni.
 - 2) Menerima subsidi uang sewa.
Maka akan dilaksanakan Pendampingan teknis penerima pelayanan berupa Penentuan rumah sewa layak huni selanjutnya adalah Penyaluran subsidi uang sewa.
 - 3) Penyediaan rumah layak huni.
Maka akan dilaksanakan Pendampingan teknis penerima pelayanan berupa Penyusunan site plan dan DED, Perjanjian penghunian dan pemanfaatan, Pengadaan lahan dan Pembangunan rusun dan atau rumah sewa.
 - 4) Pasca relokasi, dilaksanakan penghunian dan pemanfaatan.

Tabel 4.1 Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Rumus	Nilai	
1	2	3	4	5	6
Bidang Urusan Perumahan Rakyat					



1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yg memperoleh rumah layak huni	Σ unit rumah korban bencana yang ditangani pd thn 2021 Σ total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2021	100%	2021
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yg terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yg terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yg memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yg layak huni	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + Rumah tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni Σ total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	100%	2021

Tabel 4.2 Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	
		Target	Realisasi
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	
		Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	9 Unit	9 Unit
2.	Pembangunan Kembali Rumah bagi Korban Bencana	0 Unit	0 Unit
3.	Pembangunan Baru di lokasi Baru/Relokasi bagi Korban Bencana.	0 Unit	0 Unit
4.	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni bagi Korban Bencana	0 Unit	0 Unit
	(jumlah total yang harus terlayani)	9 Unit	9 Unit
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	
		Target	Realisasi
1.	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0 Unit	0 Unit
2.	Subsidi Uang Sewa	0 Korban Bencana	0 Korban Bencana
3.	Penyediaan Rumah Layak Huni	0 Unit	0 Unit
	(jumlah total yang harus terlayani)	0 Unit	0 Unit

Sumber : Data Dinas Perkim dan Cipta Karya Tahun 2022 (diolah)

Tabel 4.3 Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal 2021			Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
Perumahan Rakyat					



1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yg memperoleh rumah layak huni	100%	100%	2021
		Σ unit rumah korban bencana yg ditangani pada tahun 2021	9 rumah	9 rumah	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yg layak huni bagi masyarakat yg terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yg terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yg memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	100%	2021
		Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan	0 rumah	0 rumah	
		Rumah tangga penerima subsidi uang sewa	0 rumah	0 rumah	
		Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0 rumah	0 rumah	

Sumber : Data Dinas Perkim dan Cipta Karya Tahun 2022 (diolah)

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya belum melaksanakan penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara utuh.

Untuk SPM Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sampai pada tahap pendataan rumah, berada di tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya yaitu daerah sempadan sungai Bengawan Solo, sebagaimana terlampir.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana Kab/Kota :
 - a) Belum tersedianya data rumah yang menjadi korban bencana
 - b) Belum ada Keputusan Bupati tentang Relokasi Korban Bencana Alam
 - c) Belum tersedianya kriteria penerima bantuan
 - d) Belum tersedianya SOP penanganan rumah korban bencana
 - e) Belum tersedianya anggaran yang spesifik untuk korban bencana
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota :
 - a) Belum tersedianya data rumah yang terkena relokasi program



Pemerintah Daerah Kab/Kota

- b) Belum ada Keputusan Bupati tentang Relokasi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota
- c) Belum tersedianya kriteria penerima bantuan
- d) Belum tersedianya SOP penanganan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota
- e) Belum tersedianya anggaran yang spesifik untuk masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota.

Terhadap permasalahan penerapan dan pencapaian SPM urusan Perumahan Rakyat, solusi yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana Kab/Kota :
 - a) Pendataan rumah korban bencana
 - b) Koordinasi dengan dinas dan Desa/Kecamatan terkait
 - c) Membuat Keputusan Bupati tentang Relokasi Korban Bencana Alam
 - d) Menyusun Surat Keputusan yang berisi kriteria penerima bantuan
 - e) Menyusun SOP penanganan rumah korban bencana
 - f) Mengusulkan anggaran untuk mengantisipasi penanganan rumah korban bencana.
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - a) Pendataan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - b) Koordinasi dengan dinas dan Desa/Kecamatan terkait
 - c) Membuat Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - d) Menyusun Surat Keputusan yang berisi kriteria penerima bantuan
 - e) Menyusun SOP penanganan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - f) Mengusulkan anggaran untuk mengantisipasi penanganan rumah masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota.

4. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Sebagai dasar pelaksanaan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kab/Kota. Pelayanan dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Lamongan, dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Tabel Jenis Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi
2.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu
3.	Pelayanan informasi rawan bencana
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
6.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Tabel 4.5 Target SPM Ketenteraman & Ketertiban Umum Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi
		Target
	a. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1 warga
	b. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1 warga
2.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu
		Target
	a. Penegakan Perda sesuai SOP	164 Kegiatan
	b. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	164 Kegiatan
	c. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	164 Kegiatan



3.	Pelayanan informasi rawan bencana	
		Target
	a. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1 dokumen
	b. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	-
	c. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	-
	d. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	2 Sosialisasi
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
		Target
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.380.145 warga
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
		Target
	a. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.380.145 warga
	b. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	-
	c. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	-
	d. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	-
	e. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	-
6.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
		Target
	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	51 korban kebakaran
	Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	51 surat

Tabel 4.6 Realisasi SPM Ketentraman & Ketertiban Umum Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		PROSENTASE CAPAIAN
		Target	Realisasi	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi		



	a. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1 warga	1 warga	100%
	b. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1 warga	0 warga	0%
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu		
	a. Penegakan Perda sesuai SOP	164 kegiatan	164 kegiatan	100%
	b. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	164 Kegiatan	164 Kegiatan	100%
	c. Pelaksanaan penegakan Perda menggunakan Sarpras sesuai standar	164 Kegiatan	164 Kegiatan	100%
3.	Pelayanan informasi rawan bencana			
	a. Pemetaan terhadap lokasi/ daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1 dokumen	1 dokumen	
	b. Identifikasi & pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	-	-	
	c. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	-	-	
	d. Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	2 Sosialisasi	2 Sosialisasi	100%
	e. Pengadaan & pemasangan rambu evakuasi & papan informasi publik per jenis bencana	-	-	
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
	Jumlah Warga Negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.380.145 warga	1.380.145 warga	100%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	a. Jumlah Warga Negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.380.145 warga	1.057.235 warga	76,6 %
	b. Pendataan terhadap warga yg terkena/menjadi korban bencana	-	-	
	c. Melakukan respon cepat KLB & respon cepat darurat bencana	-	-	
	d. Aktivasi sistem komando penangan darurat bencana	-	-	
	e. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	-	-	



	f. Respon Cepat Kejadian Luar biasa (KLB) penyakit KLB/ wabah zoonosis prioritas	-	-	
6.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
	Layanan penyelamatan & evakuasi melalui pendataan & verifikasi faktual warga negara yg menjadi korban kebakaran atau terdampak	51 korban kebakaran	51 korban kebakaran	100%
	Layanan Pendataan, Inspeksi & Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga & identitas kependudukan	51 surat	51 surat	100%

Tabel 4.7 Target Pencapaian SPM Penanggulangan Bencana Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN ANGKA	TARGET CAPAIAN	ANGKA CAPAIAN	CAPAIAN
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	588.635 Warga	100%	588.635 Warga	100%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan thd bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	287.644 Warga	100%	287.644 Warga	100%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	391.516 Warga	100%	391.516 Warga	100%

Tabel 4.8 Pencapaian SPM Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			
		<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian</i>
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100%
2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di Kawasan rawan bencana	22 Peta	22 Peta	100%
3.	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	588.635 Warga	588.635 Warga	100%
4.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	22 Desa	22 Desa	100%
5.	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	100 rambu	100 rambu	100%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
		<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian</i>



1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	287.644 Warga	287.644 Warga	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	391.516 Warga	391.516 Warga	100%
2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	391.516 Warga	391.516 Warga	100%
3.	Respon cepat darurat bencana	58 Kejadian	58 Kejadian	100%
4.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	3 bulan	3 bulan	100%
5.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	391.516 Warga	391.516 Warga	100%
6.	Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1	1	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	231.930	231.930	100%
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	256.788	256.788	100%
3	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	48 Kejadian	48 Kejadian	100%
4	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	8 Bulan	8 Bulan	100%
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	231.930	231.930	100%
6	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1	1	100%
	(jumlah total yang harus terlayani)			

Sumber : Data BPBD Tahun 2022 (diolah)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Secara umum, untuk ketiga jenis pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu rata-rata terealisasi sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya dukungan sarana prasarana dan personil yang kompeten/



- bersertifikasi, guna peningkatan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Kurangnya dukungan dana pencapaian pelayanan kepada masyarakat dibidang trantibum
 - 3) Belum sebandingnya luas wilayah Kabupaten Lamongan dengan jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan, sehingga mempengaruhi kecepatan dalam penanganan kebakaran
 - 4) Jumlah anggota dan Pos di beberapa wilayah yang kurang dibanding dengan luas wilayah Kabupaten Lamongan.

Terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan Trantibum, solusi yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Dilaksanakannya pembinaan/peningkatan SDM anggota Satpol PP
- 2) Membuat usulan penambahan anggaran untuk mencapai pemenuhan SPM
- 3) Membuat usulan penambahan tenaga pemadam serta meningkatkan kapasitas tenaga yang telah ada.
- 4) Membuat usulan penambahan anggaran penambahan sarana prasarana.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

- 1) Belum adanya Rencana Kontijensi bencana Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung dan Kekeringan
- 2) Kurangnya koordinasi antara forum relawan di kabupaten lamongan sebagai penunjang penanganan darurat bencana
- 3) Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di daerah rawan bencana dalam penanganan bencana
- 4) Belum optimalnya pelatihan secara khusus yang diadakan di sekolah rawan bencana
- 5) Kurangnya kompetensi Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC)
- 6) Kurang tertibnya dalam inventarisasi di gudang
- 7) Terbatasnya alokasi pendanaan untuk pemulihan dan penataan kembali kerusakan akibat bencana baik dibidang fisik maupun non fisik
- 8) Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar kerangka kewenangan di bidang teknis sehingga kurang cepat dalam penanganan
- 9) Belum adanya kajian menyeluruh kebutuhan pasca bencana sehingga kurang informasi dalam perencanaan

10) Terbatasnya kegiatan di bidang RR dengan mengacu pada Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang SPM.

Terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan Trantibum, solusi yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya Rencana Kontijensi bencana Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung dan Kekeringan
- 2) Perlunya dilaksanakan pelatihan relawan sekaligus sebagai koordinasi
- 3) Perlunya dilaksanakan pelatihan desa tangguh lebih banyak lagi
- 4) Perlunya dilaksanakan khusus untuk sekolah di wilayah rawan bencana
- 5) Perlunya diadakan pelatihan penanganan darurat khusus anggota Tim TRC
- 6) Perlunya dilaksanakan pelatihan untuk petugas Gudang
- 7) Perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk pemulihan dan penata kembali kerusakan akibat bencana
- 8) Perlunya rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan
- 9) Sedang disusun dokumen penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana
- 10) Review Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar.

5. Bidang Sosial

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yaitu :

Tabel 5.1 Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	2021
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	2021
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	2021



4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	2021
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kab/Kota.	100%	2021

Sumber : Permendagri No. 100 Tahun 2018

Tabel 5.1 Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	99,63%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	99,99%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	99,75%
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.	100%	100%
Jumlah			100%	97,98%

Sumber : Data Dinas Sosial Tahun 2022 (diolah)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pemerintahan Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Sosial, meliputi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Bidang Sosial, Penyediaan Sarana dan Prasarana sosial, Penanggulangan Korban Bencana, serta Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia tidak potensial. Kelima jenis pelayanan dasar urusan Sosial sudah berjalan baik dan sesuai target yang ditetapkan yaitu rata-rata tercapai 100%.

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022



Analisa Capaian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja. Analisa dilakukan terhadap pencapaian kinerja sasaran dan indikator sasaran yang melampaui target dan terhadap pencapaian sasaran dan indikator sasaran yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Mengacu hasil pengukuran kinerja yang dikelompokkan dalam setiap Misi, Tujuan dan Sasaran, dapat dijelaskan bahwa secara umum pencapaian setiap indikator kinerja Sasaran dapat dikatakan **Berhasil** bahkan **Sangat Berhasil**. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak memenuhi target. Adapun secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Misi I**, dengan 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja. Apabila dirata-rata capaian 2 (dua) Sasaran tersebut sebesar **376,72% (Sangat Berhasil)**. Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 4** “Meningkatnya efektifitas investasi“ dengan indikator %Peningkatan Realisasi Investasi, sebesar **1.850,67%**, yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, sebagaimana tabel berikut :

MISI I	TUJUAN	5 SASARAN STRATEGIS
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.	1. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat
		2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
		3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		4. Meningkatnya efektifitas investasi
		5. Meningkatnya Belanja Wisatawan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender	Data belum dirilis BPS	Dinas PP dan PA
		Nilai Tukar Petani	104,19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	%PPKS yang meningkat kapasitasnya	108,96	Dinas Sosial
		Tingkat Pengangguran Terbuka	-	Dinas Tenaga Kerja
		Indeks Daya Beli	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Peternakan dan Kes. Hewan
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	788	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Perikanan
		%Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	242,46	Dinas Perindag Dinas Koperasi



		%Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	409,23	
4.	Meningkatnya efektifitas investasi	%Peningkatan Realisasi Investasi	1.850,67	Dinas PM dan PTSP
5.	Meningkatnya Belanja Wisatawan	Jumlah Pengeluaran Wisatawan	263,71	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah indikator & capaian		10	3.767,22	
Rata-rata capaian kinerja 5 Sasaran			376,72	(Sangat Berhasil)

2. Misi II, dengan 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **105,08%** (Sangat Berhasil). Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 3**, “Indeks Pembangunan Pemuda” sebesar **110,39%** yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, diikuti Sasaran 1 sebesar 104,22% dan Sasaran 2 sebesar 100,62%, sebagaimana tabel berikut :

MISI II	TUJUAN	3 SASARAN STRATEGIS
Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing.	1. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan
		2. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan
		3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	104,22	Dinas Pendidikan
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	Indeks Kesehatan	100,62	Dinas Kesehatan
3.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	110,39	Dinas Pemuda dan Olahraga
Jumlah indikator & capaian		3	315,23%	
Rata-rata capaian kinerja 3 Sasaran Strategis			105,08% (Sangat Berhasil)	

3. Misi III, dengan 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **106,44%** (Sangat Berhasil). Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 3**, “Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana” sebesar **116,67%** yang dilaksanakannya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diikuti Sasaran 2 sebesar 104,88%. Kedua sasaran tersebut memiliki capaian kinerja cukup tinggi dengan kategori Sangat Berhasil, sebagaimana tabel berikut :

MISI III	TUJUAN	3 SASARAN STRATEGIS
Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan.	1. Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata
		2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
		3. Meningkatkan Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur	97,77	Dinas PU Bina Marga, DPU SDA Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Cipta Karya
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	104,88	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	116,67	BPBD
Jumlah indikator & capaian		3	319,32%	
Rata-rata capaian kinerja 3 Sasaran			106,44%	(Sangat Berhasil)

4. **Misi IV**, dengan 4 (empat) Sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja dan semua memenuhi target yang ditetapkan. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **125,38%** (**Sangat Berhasil**). Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 3**, “Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotong-royong” sebesar **135,90%** yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, diikuti Sasaran 2 sebesar 133,92% dan Sasaran 1 sebesar 129,32%, sebagaimana tabel berikut :

MISI IV	TUJUAN	4 SASARAN STRATEGIS
Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Relegius, Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan serta Lingkungan yang Aman dan Tenram.	Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal	1. Meningkatkan Toleransi
		2. Meningkatkan Rasa Aman Masyarakat
		3. Meningkatkan Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotongroyong
		4. Meningkatkan Masyarakat Berbudaya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi	129,32	Bakebangpol
2.	Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	Nilai Stabilitas	133,92	Satpol PP
3.	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotong-royong	Nilai Solidaritas	135,90	Dinas Sosial
4.	Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	102,36	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah indikator & capaian		4	501,50%	
Rata-rata capaian kinerja 4 Sasaran Strategis			125,38%	(Sangat Berhasil)



5. **Misi V**, dengan 4 (empat) Sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja, 5 (lima) indikator memenuhi target yang ditetapkan dan 2 (dua) indikator tidak mencapai target. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **146,46%**. Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 4**, “Meningkatnya Kemandirian Desa” sebesar **450,00%**, berikutnya Sasaran 1 “Meningkatnya pelayanan publik yang inovatif” sebesar 100,67%, selanjutnya Sasaran 3 sebesar masing-masing 100,00% sebagaimana tabel berikut

MISI V	TUJUAN	4 SASARAN STRATEGIS
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yg Dinamis serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.	1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif 2. Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal 4. Meningkatnya Kemandirian Desa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM Indeks SPBE	100,67 77,26	Bagian Organisasi Setda Dinas Kominfo
2.	Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	97,32	BKPSDM
3.	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Predikat SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP	100,00 100,00 100,00	Bapelitbangda, BPKAD, Inspektorat, Bagian Organisasi BPKAD Inspektorat
4.	Meningkatnya Kemandirian Desa	%Peningkatan Desa Mandiri	450,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah indikator & capaian		7	1.025,25	
Rata-rata capaian kinerja 4 Sasaran Strategis			146,46% (Sangat Berhasil)	

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada setiap Misi, Tujuan dan Sasaran tidak terlepas dari dukungan seluruh potensi sumber daya, sarana dan prasarana serta dukungan sumber dana APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 dan sumber anggaran dana lain seperti DAU, DAK, anggaran dari Provinsi serta anggaran lainnya misal anggaran CSR yang diselaraskan dengan Program dan Kegiatan serta pencapaian target pada masing-masing Perangkat Daerah. Seluruh potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal guna mencapai keberhasilan pencapaian setiap target kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

Adapun program dan kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang baik dengan menampung aspirasi seluruh masyarakat melalui kegiatan MUSRENBANG secara berjenjang dari bawah yang selanjutnya dirumuskan menjadi target kinerja setiap Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan urusan / bidang dan tugas pokok fungsi yang menjadi kewenangannya, sehingga diharapkan dapat tepat sasaran dan mendapatkan hasil yang optimal.

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Sejak diterapkannya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut, sesuai Pasal 284 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan secara legal dan akuntabel, maka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung- jawaban pelaksanaan APBD harus mengacu dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007. Untuk sinkronisasi dengan ketentuan yang lebih tinggi sesuai karakter dan kebutuhan daerah secara teknis pengelolaan keuangan daerah harus dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 02 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya secara rinci terkait alokasi Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 (Anggaran setelah Perubahan) dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan indikator kerjanya, disajikan sebagaimana tabel berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI I				
1.	Sasaran 1 , Urusan Pemberdayaan Masyarakat (Diinas PP dan PA, Dinas KPP, Dinas Peternakan dan Keswan)	91.038.310.810,00	82.283.188.360,55	91,89
2.	Sasaran 2 , Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Dinas Sosial, Disnaker)	24.600.109.209,00	23.961.787.977,00	97,41
3.	Sasaran 3 , Urusan Perekonomian (Disperindag, Dinkopum, Dinas Perikanan)	31.956.743.647,00	30.203.851.761,10	94,51
4.	Sasaran 4 , Urusan Investasi (DPMPSTP)	6.915.729.002,00	6.410.215.480,97	92,69
5.	Sasaran 5 , Urusan Pariwisata (Disparbud)	2.292.022.000,00	1.441.969.170,00	62,91
Anggaran & realisasi Sasaran (10 indikator)		.156.802.914.668,00	144.301.012.748,62	92,03

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja **2 (dua)** Sasaran pada **Misi I** dengan rata-rata prosentase sebesar **92,03%** atau terdapat efisiensi sebesar (376,72% – 92,03%) = **284,7%**.

NO	U R A	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI II				
1.	Sasaran 1, Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan)	848.346.569.342,00	833.428.656.710,00	98,24
2.	Sasaran 2, Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan dan RSUD)	723.284.941.873,00	651.604.345.993,70	92,23
3.	Sasaran 3, Urusan Kepemudaan (Dispora)	21.053.741.347,00	19.647.112.954,57	93,32
Anggaran & realisasi Sasaran (3 indikator)		1.592.685.252.562,00	1.504.680.115.658,00	94,47

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja **3 (tiga)** Sasaran pada **Misi II** dengan rata-rata prosentase sebesar **94,47%** atau terdapat efisiensi sebesar $(105,08\% - 94,47\%) = 10,61\%$.

NO	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI III				
1.	Sasaran 1, Urusan Pekerjaan Umum (Dinas PU Bina Marga)	90.000.000,00	90.265.000,00	100,29
	Urusan Pekerjaan Umum (Dinas PU SDA)	100.000.000,00	100.028.035,00	100,03
	Dinas Perhubungan	10.100.000.000,00	8.942.742.000,00	88,54
	Urusan Pekerjaan Umum (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya)	85.434.157.713,00	82.119.113.400,00	96,12
2.	Sasaran 2, Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	375.000.000,00	125.075.000,00	33,35
3.	Sasaran 3, Urusan Penanggulangan Bencana (BPBD)	5.160.861.750,00	5.029.714.634,00	97,46
Anggaran & realisasi Sasaran (9 indikator)		101.260.019.463,00	96.406.938.069,00	95,21

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja **3 (tiga)** Sasaran pada **Misi III** dengan rata-rata prosentase sebesar **95,21%** atau terdapat efisiensi sebesar $(106,44\% - 95,21\%) = 11,23\%$.

NO	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI IV				
1.	Sasaran 1, Urusan Toleransi Sosial (Bakesbangpol)	9.569.021.690,00	9.417.959.529,00	98,42
2.	Sasaran 2, Urusan Ketenteraman & Ketertiban Umum (Satpol PP)	18.099.748.054,00	14.691.945.965,00	81,17
3.	Sasaran 3, Urusan Sosial (Dinas Sosial)	7.158.291.070,00	6.785.689.559,00	91,42
4.	Sasaran 4, Urusan Kebudayaan (Disparbud)	305.000.000,00	304.685.326,00	99,97
Anggaran & realisasi Sasaran (10 indikator)		35.132.060.814,00	31.200.280.379,00	88,81

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja **4 (empat)** Sasaran pada **Misi IV** dengan rata-rata prosentase sebesar **88,81%** atau terdapat efisiensi sebesar $(125,38\% - 88,81\%) = 36,57\%$.

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI V				
1.	Sasaran 1 , Urusan Pelayanan Publik (Dinas Kominfo, Bag. Organisasi Setda)	12.672.508.012,00	12.381.007.667,00	97,70
2.	Sasaran 2 , Urusan Kapasitas ASN (BKPSDM)	11.092.307.200,00	10.411.744.880,36	93,86
3.	Sasaran 3 , Urusan Manajemen Pemerintahan (Bapelitbangda, BPKAD, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda)	772.316.010.464,00	734.883.438.342,00	95,15
4.	Sasaran 4 , Urusan Kemandirian Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan)	102.382.323.220,00	95.658.945.200,33	93,43
Anggaran & realisasi Sasaran (7 indikator)		898.463.148.896,00	853.335.136.089,36	94,98

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja **4 (empat)** Sasaran pada **Misi V** dengan rata-rata prosentase sebesar **94,98%** terdapat efisiensi sebesar $(146,46\% - 94,98\%) = 251,48\%$.

Selanjutnya apabila dirata-rata, prosentase realisasi anggaran dari **Kelima Misi** dan **Kelima Tujuan** tersebut adalah sebesar **93,10%**. Dengan prosentase realisasi anggaran tersebut, ternyata dapat tercapai keberhasilan-keberhasilan pencapaian target-target kinerja Sasaran dan indikator Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 khususnya pada target-target kinerja yang telah ditetapkan di Tahun Anggaran 2022.

Dan jika dihitung efisiensi penggunaan sumber daya secara keseluruhan dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut :
 $172,02\%$ (% rerata capaian kinerja) – $93,10\%$ (% rerata capaian anggaran) = **78,92%**.

Selanjutnya untuk mengetahui keterkaitan tingkat efisiensi dan efektivitas antara prosentase penyerapan anggaran dengan prosentase capaian kinerja setiap Sasaran, maka dilakukan pengukuran sebagaimana tabel berikut :

MISI I					
NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA 2022	RATA-RATA % SERAPAN ANGGARAN 2022	TINGKAT EFISIENSI (%)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	2	104,19	91,89	12,30
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	3	108,96	97,41	11,55
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	3	1.166,87	94,51	1.072,36
4.	Meningkatnya efektifitas investasi	1	1.850,67	92,69	1.757,98
5.	Meningkatnya Belanja Wisatawan	1	263,71	62,91	200,80

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh **Sasaran 4** dan diikuti Sasaran 3. Hal ini dapat tercapai karena adanya perencanaan yang baik didukung program/kegiatan yang tepat sasaran dan SDM Aparatur yang kompeten dengan kinerja yang tinggi, kecermatan dalam mengelola dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang ada serta didukung kolaborasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait.

MISI II					
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA 2022	RATA-RATA % SERAPAN ANGGARAN 2022	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	1	104,22	98,24	5,98
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	1	100,62	92,23	8,39
3.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	1	110,39	93,32	17,07

Pada tabel diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh **Sasaran 3**, diikuti Sasaran 2 dan Sasaran 1. Hal ini dapat tercapai karena adanya perencanaan yang baik didukung program/kegiatan yang tepat sasaran dan SDM Aparatur yang kompeten dengan kinerja yang tinggi, kecermatan dalam mengelola dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang ada serta didukung kolaborasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait.

MISI III					
NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA 2022	RATA-RATA % SERAPAN ANGGARAN 2022	TINGKAT EFISIENSI (%)
1.	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1	97,77	96,25	1,52
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	104,88	33,35	71,53
3.	Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	1	116,67	97,46	19,21

Pada tabel diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh **Sasaran 2**, diikuti Sasaran 2 dan Sasaran 1. Hal ini dapat tercapai karena adanya



perencanaan yang baik didukung program/kegiatan yang tepat sasaran dan SDM Aparatur yang kompeten dengan kinerja yang tinggi, kecermatan dalam mengelola dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang ada serta didukung kolaborasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait.

MISI IV					
NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA 2022	RATA-RATA % SERAPAN ANGGARAN 2022	TINGKAT EFISIENSI (%)
1.	Meningkatnya Toleransi	1	129,32	98,42	30,90
2.	Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	1	133,92	81,17	52,75
3.	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotong-royong	1	135,90	91,42	44,48
4.	Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	1	102,36	99,97	2,39

Pada tabel diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh **Sasaran 2**, diikuti Sasaran 3 dan Sasaran 1. Hal ini dapat tercapai karena adanya perencanaan yang baik didukung program/kegiatan yang tepat sasaran dan SDM Aparatur yang kompeten dengan kinerja yang tinggi, kecermatan dalam mengelola dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang ada serta didukung kolaborasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait.

MISI V					
NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA 2022	RATA-RATA % SERAPAN ANGGARAN 2022	TINGKAT EFISIENSI (%)
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	2	97,70	88,97	8,73
2.	Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	1	97,32	93,86	3,46
3.	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	3	100,00	95,15	4,85
4.	Meningkatnya Kemandirian Desa	1	450,00	93,43	356,57

Pada tabel diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh **Sasaran 4**, diikuti Sasaran 1 dan Sasaran 3. Hal ini dapat tercapai karena adanya perencanaan yang baik didukung program/kegiatan yang tepat sasaran dan SDM Aparatur yang kompeten dengan kinerja yang tinggi, kecermatan dalam mengelola dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang ada serta didukung kolaborasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait.

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian kinerja yang optimal terhadap **23** (dua puluh tiga) **Sasaran** dan **39** (tiga puluh sembilan) **Indikator kinerja Sasaran** sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, APBD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 3.381.346.115.286,00 dengan

realisasi sebesar Rp 3.188.128.408.326,07 (**94,29%**). Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan anggaran sebesar Rp 355.087.500.325,00 dan terealisasi sebesar Rp 354.152.823.586,90 (**99,74%**). Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan anggaran sebesar Rp 37.321.428.571,00 dan terealisasi sebesar Rp 26.200.772.165,10 (**70,20%**). Sementara Pembiayaan Netto anggaran setelah perubahan sebesar Rp 317.766.071.754,00 dan terealisasi sebesar Rp 327.952.051.421,80 (**103,21%**), sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 88.745.011.130,56.

Adapun secara terinci mengenai Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Neraca Pemerintah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam Rupiah) sebagaimana **Tabel 3.1** dan **Tabel 3.2** sebagai berikut :

TABEL 3.1
NERACA APBD PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021





TABEL 3.2
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PENDAPATAN
DAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2021





Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam rangka pencapaian Sasaran strategis RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 telah terealisasi dengan prosentase capaian kinerja setiap Sasaran jika dirata-rata sebesar **172,02%** dari anggaran yang ditetapkan dengan menerapkan prinsip penggunaan anggaran yang efisien dan efektif dengan memperhatikan skala prioritas, mengingat adanya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Lamongan, dengan harapan anggaran yang dibelanjakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat tepat sasaran dan berdampak positif serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Lamongan..

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan telah diperoleh Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dari rencana yang ditetapkan dalam setelah perubahan anggaran sebesar Rp 523.035.537.324,00 pada tahun anggaran berjalan terealisasi sebesar Rp 508.988.799.780,83 tercapai sebesar **97,31%**, sebagaimana **Tabel 3.3** dibawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022

No	Komponen PAD	APBD 2022		%
		Target	Realisasi	
1.	Pendapatan Pajak Daerah	147.391.000.000,00	154.084.289.422,00	97,68
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	20.701.873.200,00	23.605.842.847,89	114,03
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	22.855.892.314,00	17.199.695.333,86	75,25
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	332.086.771.810,00	314.098.972.177,08	94,58
Jumlah PAD		523.035.537.324,00	508.988.799.780,83	97,31

Sumber : Ringkasan Laporan Realisasi APBD Th. 2022, per 31 Desember Tahun 2022 dan 2021

Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan menyusun dan melaporkan keuangan pada sisi Pendapatan Transfer dari rencana yang ditetapkan setelah perubahan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 2.523.879.476.317,00 pada perkembangannya selama tahun anggaran berjalan terealisasi sebesar Rp. 2.393.201.465.231,00 atau terealisasi sebesar **94,82%**.



Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan dapat dilihat pada **Tabel 3.4** dibawah ini :

Tabel 3.4
Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2022

No	Komponen Pendapatan	APBD 2021		%
		Target	Realisasi	
1.	Pendapatan Asli Daerah	523.035.537.324,00	508.988.799.780,83	97,31
2.	Pendapatan Transfer	2.523.879.476.317,00	2.393.201.465.231,00	94,82
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	16.665.029.891,00	46.731.103.023,00	280,41
Jumlah Pendapatan Daerah		3.063.580.043.532,00	2.948.921.368.034,83	196,26

Sumber : Ringkasan Laporan Realisasi APBD Th. 2022, per 31 Desember Tahun 2022 dan 2021

Adapun Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Tahun Anggaran 2021 target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran sebesar Rp 2.329.340.517.358,00 terealisasi sebesar Rp 2.249.492.084.740,00 atau tercapai sebesar **96,57%** sebagaimana tertera pada **Tabel 3.5** dibawah ini :

Tabel 3.5
Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022

No	Komponen Dana Perimbangan	APBD 2021		%
		Target	Realisasi	
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.212.494.202.000,00	2.172.526.055.774,00	98,19
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	311.385.274.317,00	220.675.409.457,00	70,87
Jumlah Dana Perimbangan		2.523.879.476.317,00	2.393.201.465.231,00	94,82

Sumber : Ringkasan Laporan Realisasi APBD Th. 2022, per 31 Desember Tahun 2022 dan 2021

Disamping perolehan target dan realisasi pendapatan, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga melaksanakan Belanja Daerah, sebagaimana posisi Belanja Daerah secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp 2.696.178.712.678,00 terealisasi sebesar Rp 2.503.885.316.018,07 (**92,87%**), terdapat selisih lebih sebesar Rp 192.293.396.659,93, sebagaimana **Tabel 3.6** sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2022

No	Komponen Belanja	APBD 2022		%
		Target	Realisasi	
A.	BELANJA OPERASIONAL	2.135.879.995.948,00	2.008.473.791.439,87	94,03
1.	Belanja Pegawai	973.806.131.996,00	942.838.850.247,00	96,82
2.	Belanja Hibah	241.315.333.000,00	236.901.638.146,58	98,17
3.	Belanja Bantuan Sosial	15.217.020.000,00	13.942.582.500,00	91,62
4.	Belanja Barang dan Jasa	901.541.510.952,00	812.992.014.924,23	90,18
5.	Belanja Bunga	4.000.000.000,00	1.798.705.622,06	44,97
6.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
B.	BELANJA MODAL	528.798.716.730,00	492.502.248.778,20	93,14
1.	Belanja Tanah	49.480.500.000,00	42.354.601.601,00	85,60
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	143.524.210.105,00	133.859.921.691,00	93,27
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	87.167.498.551,00	74.106.837.292,15	85,02
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	234.825.078.874,00	229.769.914.025,05	97,85
5.	Belanja Aset Tetap lainnya	13.801.429.200,00	12.410.974.169,00	89,93
6.	Belanja Aset lainnya	0,00	0,00	0,00
C.	BELANJA TIDAK TERDUGA	31.500.000.000,00	2.909.275.800,00	9,24
Jumlah Belanja		2.696.178.712.678,00	2.503.885.316.018,07	92,87
Surplus / (Defisit)		(192.293.396.659,93)		

Sumber : Ringkasan Laporan Realisasi APBD Th. 2021, per 31 Desember Tahun 2021

Selain itu Pemerintah Kabupaten Lamongan juga melaksanakan Pembiayaan Daerah yang mencakup Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana posisi Pembiayaan Daerah secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2022, sebagaimana **Tabel 3.7** sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022

No	Komponen Pembiayaan	APBD 2022		Bertambah / (Berkurang)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
A	PENERIMAAN DAERAH	355.087.500.325,00	354.152.823.586,90	(934.676.738,10)	99,74
1.	Penggunaan SILPA	155.087.500.325,00	155.087.500.325,00	5.112.000,49	100,01
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pinjaman Dalam Negeri – Pem. Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000,00	198.935.958.261,48	(1.064.041.738,54)	99,47
6.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	129.365.000,00	129.365.000,00	0,00



B	PENGELUARAN DAERAH	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	100,00
1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	37.321.428.571,00	26.200.772.165,10	(11.120.656.405,90)	0,00
4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto		317.766.071.754,00	327.952.051.421,80	10.185.979.667,80	103,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		0,00	88.745.011.130,56	88.745.011.130,56	0,00

Sumber : Ringkasan Laporan Realisasi APBD Th. 2022, per 31 Desember Tahun 2022 dan 2021

